

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majunya perekonomian di suatu negara, tentunya di dukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan di negara tersebut. Di Indonesia, lembaga keuangan berkembang cukup pesat. Tidak hanya lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah pun ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.¹ Konsep ekonomi syariah di tandai dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, sebagai bank umum pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPR Syariah) pada tahun yang sama. Lapisan masyarakat Islam yang lebih rendah, bagaimanapun belum terpengaruh oleh keberadaan kedua lembaga ini. Oleh karena itu, salah satu lembaga keuangan mikro *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) muncul untuk menyediakan layanan simpan pinjam.²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dilihat dari struktur namanya merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unsur yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, yang mana kedua unsur dari nama tersebut mencerminkan kegiatan usahanya.

¹ Dwi Maisaroh, "Implementansi PSAK 101 Dan Islamic Corporate Governance Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT AL-NAJAH Kantor Pusat Kauman)," *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024).

² Yuliyanti M. Manan dan Devi Sofiyatul Fatimah, "Analisis Implementasi SAK Nomor 101 pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 116.

Baitul maal berarti fokus kegiatan usaha BMT bergerak pada kegiatan yang tidak berorientasi laba, yaitu dengan menerima dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Sedangkan *Baitul tanwil* berarti fokus kegiatan BMT pada kegiatan yang berorientasi profit dengan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha kecil dan mikro serta mendorong kegiatan menabung.³

Laporan keuangan BMT dibuat bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas BMT yang bermanfaat bagi manajemen dalam rangka membuat perencanaan, pengukuran kinerja, dan sebagai acuan pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan juga diinformasikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dana terhadap para anggota. Dalam rangka mengatur laporan keuangan BMT maka dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, menegaskan bahwa perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan syariah. Karena BMT merupakan salah satu koperasi dengan basis syariah, maka dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 101 tentang

³ Usnan Putriningtyas, "Akuntabilitas Bmt: Analisis Berdasarkan Implementasi Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan" *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 9, no. 10 (2021): 18.

penyajian laporan keuangan syariah. pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.⁴

Pada tanggal 27 Juni 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan PSAK 101. Aturan ini hadir menggantikan ketentuan tentang bagaimana laporan keuangan syariah disajikan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59: Akuntansi Bank Syariah, yang berlaku sejak 1 Mei 2002.⁵ PSAK 101 ini memberikan kerangka dasar dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum bagi entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶ Lebih lanjut, PSAK 101 juga menjabarkan bagaimana laporan keuangan syariah disusun dan apa saja isinya seperti: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan.⁷

Tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan berarti pengurus wajib membangun sistem akuntansi yang baik agar laporan keuangan yang dihasilkan kredibel. Lebih dari itu, akuntabilitas mencakup kejelasan peran di organisasi dan bagaimana pertanggungjawabannya. Akuntabilitas menjadi fondasi

⁴ Naurah Nazhifah, Iwan Wisandani, and Lina Marlina, "Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 44.

⁵ Rola Manjaleni and Syahrul Rivaldy Irawan, "Penerapan Psak 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat," *Frima* 6681, no. 7 (2024): 232–240.

⁶ Nia Azizah Razak and Amrie Firmansyah, "Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai Dengan PSAK 101?," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 2 (2021): 143.

⁷ Isnaini Rahmatunnisa, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (Psak 101) Pada laporan Keuangan Ksp Bmt Surya Abadi Jenangan," *Sustainability (Switzerland)* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo., 2022). 3.

utama guna menghindari praktik korupsi dan memastikan kekuasaan digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dengan tingkat efisiensi, efektivitas, integritas, serta kearifan yang optimal.⁸

Pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya memegang amanah disebut sebagai akuntabilitas. Ini adalah prinsip dasar yang memastikan semua kegiatan dalam sebuah organisasi dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas di suatu lembaga, semakin besar pula kepercayaan anggota saat melakukan transaksi penyimpanan dan pinjaman. Agar akuntabilitas meningkat, standar akuntansi yang digunakan harus selaras dengan PSAK 101.⁹

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan lembaga keuangan syariah mencakup unsur-unsur dari kegiatan usaha, aktivitas sosial, dan pertanggungjawaban khusus yang diemban lembaga tersebut. Terlepas dari kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh seluruh BMT sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana masyarakat, kenyataannya banyak BMT yang belum sepenuhnya akuntabel jika dilihat dari penerapan PSAK syariah dalam penyusunan dan tampilan laporan keuangannya. Selain itu, muncul juga indikasi bahwa pengetahuan sumber daya manusia mengenai penerapan PSAK 101 dalam pembuatan laporan keuangan masih terbatas.¹⁰

⁸ Endah Sulastris Tarigan, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Labuhan Batu Selatan," *Executive Summary* (Institut Agama Islam Negeri, 2021). 1-2

⁹ Nova Andani and Laylan Syafina, "Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang," *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 1 (2022): 121–128.

¹⁰ Renny Wulandari, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak," *E-Jurnal Equilibrium Manajemen* 2, no. 1 (2019): 1–17, <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/82>.

Karena ada indikasi bahwa banyak BMT belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam menyusun laporan keuangan, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Mengingat BMT adalah institusi keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana masyarakat, akuntabilitas mereka salah satunya diwujudkan melalui laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. KSPPS BMT Makin Amin, yang berlokasi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, adalah contoh lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi. BMT Makin Amin mulai beroperasi pada tanggal 20 November 2020 dengan tujuan memberikan solusi nyata kepada masyarakat dalam memerangi praktik riba serta meningkatkan kesadaran akan bahayanya. Meskipun tergolong baru, BMT ini terus mengalami peningkatan jumlah anggota yang aktif bertransaksi setiap bulannya.

Tahun 2023 tepatnya pada bulan Desember, jumlah anggota di BMT Makin Amin sebanyak 99 anggota. Mungkin bagi lembaga yang sudah berdiri sejak lama jumlah tersebut masih termasuk kategori sedikit. Akan tetapi, untuk ukuran lembaga yang bisa dikatakan baru berdiri, jumlah tersebut sudah cukup banyak apalagi BMT Makin Amin bukan terletak di perkotaan. Hal unik yang menarik perhatian peneliti memilih BMT Makin Amin Kamal sebagai objek penelitian yaitu karena BMT ini masih dapat dikatakan baru berdiri tetapi laporan keuangan yang dibuat sudah baik dan komponennya lengkap. Sehingga peneliti ingin menganalisis lebih dalam lagi apakah laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Makin Amin ini sudah benar-benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketika ada ketidaksesuaian dapat

diperbaiki mulai dari sejak dini sehingga ke depannya bisa lebih baik lagi dan tentunya lebih berkembang. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Peneliti mengangkat judul “Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan BMT Makin Amin Kamal Berdasarkan PSAK No. 101”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut ini adalah identifikasi masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini:

1. Belum optimalnya penerapan PSAK No. 101
2. Belum optimalnya penerapan PSAK No.101 berakibat tingkat pertanggungjawaban keuangan belum maksimal
3. Minimnya pemahaman SDM terhadap PSAK Syariah

C. Pembatasan Masalah

Perumusan masalah menjadi krusial agar cakupan studi menjadi lebih terarah, tajam, dan terperinci. Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka lingkup studi ini dibatasi pada laporan keuangan BMT Makin Amin sebagai objek penelitian. Pembatasan ini dilakukan karena peneliti bermaksud untuk memahami dan mengkaji akuntabilitas serta relevansi laporan keuangan BMT tersebut dengan PSAK 101.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas laporan keuangan BMT Makin Amin Kamal Berdasarkan PSAK No. 101?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan BMT Makin Amin berdasarkan PSAK No.101.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian dibidang akuntansi syariah, terutama implementasi PSAK No. 101 terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Serta menjadi acuan bagi peneliti yang lain yang ingin mengkaji akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada BMT Makin Amin Kamal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangannya agar sesuai dengan PSAK 101. Kemudian membantu BMT dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara lebih baik lagi.

c. Kegunaan Sosial

Mendukung peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana oleh lembaga keuangan syariah. Serta memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah lainnya agar memastikan penyajian laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku demi pengelolaan dana umat yang lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan panduan dalam penelitian ini, didasarkan pada tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wila Kartika Dewi, 2020 yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi”.¹¹ Pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi menurut PSAK 101. Di mana fokus analisisnya yaitu pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di mana komponen laporan tersebut belum lengkap dan rinci berdasarkan PSAK 101. Berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian ini menganalisis akuntabilitas laporan keuangan BMT berdasarkan PSAK 101. Serta semua komponen-komponen laporan keuangan PSAK 101 di analisa. Kemudian karakteristik dari setiap komponen laporan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Yurian, 2020 tentang “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara)”.¹² Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memuat terkait penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani perspektif

¹¹ Wila Kartika Dewi, “Analisis Penerapan Psak 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Bmt Al-Hijrah Bukittinggi” (universitas islam negeri sulta syarif kasim riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/31892/>.

¹² Alfi Yurian, “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara),” *Journal GEEJ* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

PSAK 101. Kemudian membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penyajian laporan. Di mana BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Ada 2 faktor internal dan eksternal menjadi sebab BMT Masyarakat Madani masih belum sesuai dengan PSAK 101. Berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian ini menganalisis semua komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, serta karakteristik laporan keuangan di setiap komponen. Selain itu, penelitian ini juga membahas akuntabilitas laporan keuangan BMT dan menegaskan betapa pentingnya *akuntabel* dalam laporan keuangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Safaroh, 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT di Kendal (KSPPS BMT Bismillah Sukoreja Kendal dan KSPPS BMT NU Sejahtera Weleri kendal)”.¹³ Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif. Di mana membahas tentang cara penyajian laporan keuangan di KSPPS BMT Bismillah Sukoreja dan KSPPS BMT NU Sejahtera Weleri sesuai PSAK 101. Kedua lembaga keuangan syariah ini sama-sama belum mematuhi PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Ada komponen yang belum disertakan dengan lengkap. Hal ini disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar lembaga. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menganalisis akuntabilitas laporan keuangan BMT berdasarkan PSAK 101.

¹³ Siti Safaroh, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Di Kendal (KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal Dan KSPPS BMT NU Sejahtera Weleri Kendal),” *Braz Dent J.* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Serta semua komponen-komponen laporan keuangan PSAK 101 di analisa. Kemudian karakteristik dari setiap komponen laporan tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Naura Nazhifah, dkk. 2020 yang berjudul “ Analisis implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya”.¹⁴ Dalam studi ini, diterapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengupas pelaksanaan PSAK 101 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. Di dalam laporan keuangan BMT Al-Bina terdeteksi adanya ketidaksesuaian dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Terdapat beberapa elemen laporan keuangan yang belum disajikan dan tidak mengikuti kebijakan akuntansi yang ada. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis membahas terkait akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 101. Kemudian penulis juga menganalisis karakteristik dari setiap komponen-komponen laporan keuangan PSAK 101.

5. Jurnal yang ditulis oleh Suharyono, dkk. 2022 yang berjudul “Implementasi Penyajian laporan Keuangan BMT Abdurrah”.¹⁵ Dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Di mana pada penelitian membahas tentang sejauh mana implementasi PSAK 101 terhadap penyajian laporan keuangan di BMT Abdurrah. Di mana PSAK 101 ini memang sudah diterapkan namun belum sepenuhnya. Masih diperlukan evaluasi kembali agar bisa benar-benar sesuai dengan PSAK 101.

¹⁴ Nazhifah, Wisandani, and Marlina, “Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.”

¹⁵ Suharyono Suharyono and Naya Jesika Ananda, “Implementasi Penyajian Laporan Keuangan BMT Abdurrah,” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 57.

Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis di mana penulis tidak hanya fokus pada penyajian laporan keuangan PSAK 101, akan tetapi juga pada akuntabilitas serta karakteristik dari laporan keuangan itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang teratur, peneliti harus menyusun suatu sistematika sedemikian rupa agar hasil penelitian bisa baik dan mudah dimengerti. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan alur pembahasan.

Bab II Pembahasan Umum mengenai tema atau pokok bahasan yang mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini, termasuk teori tentang definisi akuntabilitas, definisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dan komponen-komponen laporan keuangan menurut PSAK 101

Bab III memberikan gambaran umum tentang BMT Makin Amin Kamal, yang mencakup sejarah singkat BMT Makin Amin Kamal, profil BMT Makin Amin Kamal, serta visi dan misi BMT Makin Amin Kamal.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas laporan keuangan BMT Makin Amin Kamal berdasarkan PSAK 101.

Bab V adalah bagian penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian akhir dari suatu penulisan penelitian. Disertakan juga daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang relevan.